



Politik Anggaran di Indonesia:

Antara Populisme, Prioritas Sosial, dan Disiplin Fiskal



Oleh

Rudy C. Tarumingkeng

*Rudy C Tarumingkeng: Politik Anggaran di Indonesia: Antara
Populisme, Prioritas Sosial, dan Disiplin Fiskal*

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

POLITIK ANGGARAN DI INDONESIA - ANTARA POPULISME, PRIORITAS SOSIAL, DAN DISIPLIN FISKAL

Politik anggaran adalah salah satu jendela terbaik untuk membaca watak sebuah negara. Di dalam pidato-pidato politik, seorang pemimpin dapat menjanjikan banyak hal; tetapi di dalam anggaran, negara dipaksa memilih. Pilihan itu selalu konkret: sektor mana yang diprioritaskan, kelompok sosial mana yang ingin dilindungi, proyek apa yang dipercepat, dan beban fiskal seperti apa yang masih dianggap aman. Karena itu, anggaran tidak pernah netral. Ia selalu memuat dimensi ekonomi, administratif, moral, dan tentu saja politik. Dalam konteks Indonesia, terutama pada masa transisi dari APBN 2025 ke APBN 2026, dimensi politik itu terlihat semakin jelas. Negara ingin hadir secara lebih nyata melalui program-program yang langsung terasa oleh masyarakat, tetapi pada saat yang sama negara juga dibatasi oleh kebutuhan menjaga defisit, pembiayaan, dan kepercayaan pasar. Di titik inilah muncul tegangan mendasar: sampai sejauh mana anggaran dapat dipakai sebagai alat legitimasi politik tanpa merusak disiplin fiskal yang menopang stabilitas jangka menengah? (media.kemenkeu.go.id)

Dalam diskursus kebijakan publik, APBN kerap digambarkan sebagai instrumen **alokasi, distribusi, dan stabilisasi**. Namun dalam praktik politik, APBN lebih dari itu. Ia adalah arena negosiasi antara visi pemerintahan, aspirasi masyarakat, tuntutan birokrasi, kalkulasi elektoral,

dan batas-batas ekonomi makro. Pemerintah Indonesia sendiri dalam penjelasan resmi RAPBN 2026 menempatkan APBN sebagai instrumen strategis untuk merespons gejolak global, menjaga perekonomian domestik, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di atas kertas, tujuan ini terdengar teknokratis dan mulia. Tetapi ketika masuk ke dalam desain belanja, muncul pertanyaan yang lebih politis: apakah anggaran terutama diarahkan untuk investasi jangka panjang, untuk perlindungan sosial, untuk proyek simbolik, atau untuk membangun dukungan politik yang luas bagi pemerintahan? Pertanyaan tersebut penting, sebab struktur anggaran sering kali mengungkap prioritas kekuasaan lebih jujur daripada slogan-slogan kampanye. (media.kemenkeu.go.id)

Pada titik ini, perlu ditegaskan bahwa politik anggaran bukanlah sesuatu yang otomatis buruk. Dalam negara demokratis, anggaran memang seharusnya bersifat politis, sebab ia merupakan hasil pilihan kolektif tentang apa yang dianggap penting. Menjadi masalah apabila politik anggaran jatuh ke dalam populisme fiskal yang sempit: belanja diperbesar terutama untuk menghasilkan efek popularitas jangka pendek, tanpa desain implementasi yang matang, tanpa evaluasi manfaat yang jelas, dan tanpa strategi pembiayaan yang sehat. Populisme fiskal biasanya bekerja dengan logika yang sederhana tetapi efektif: manfaat diumumkan segera, biaya fiskal ditunda atau disebar ke masa depan. Program-program yang bersifat langsung, mudah dipahami, dan cepat terlihat lebih menarik secara politik dibandingkan reformasi struktural yang hasilnya baru terasa beberapa tahun kemudian. Karena itu, dalam hampir semua rezim demokratis, godaan menggunakan anggaran sebagai instrumen popularitas selalu sangat besar.

Namun, menyamakan seluruh belanja sosial dengan populisme juga merupakan kekeliruan. Negara modern tidak mungkin netral terhadap ketimpangan, kemiskinan, gizi buruk, keterbatasan akses pendidikan, atau kerentanan kelompok rentan. Di sinilah penting membedakan

populisme anggaran dari **prioritas sosial yang legitimate**. Sebuah belanja sosial dapat disebut prioritas strategis jika memenuhi beberapa syarat: pertama, ia menanggapi masalah publik yang nyata dan terukur; kedua, ia dirancang dengan target penerima yang jelas; ketiga, implementasinya realistis; keempat, ada mekanisme evaluasi hasil; dan kelima, pembiayaannya tidak mengorbankan keberlanjutan fiskal secara berlebihan. Dengan kata lain, program sosial tidak boleh dinilai hanya dari popularitasnya, tetapi juga dari mutu desain kebijakan dan konsistensinya dengan kapasitas fiskal negara. Sebuah negara yang mengabaikan perlindungan sosial dapat kehilangan legitimasi moral; tetapi negara yang mengabaikan disiplin fiskal dapat kehilangan kemampuan untuk membiayai perlindungan sosial itu sendiri.

Konteks Indonesia tahun 2025–2026 memberi contoh yang sangat jelas mengenai ketegangan tersebut. Dalam **Nota Keuangan RAPBN 2026**, pemerintah mula-mula merancang defisit sebesar **2,48 persen dari PDB**, atau sekitar **Rp638,8 triliun**, dengan penekanan bahwa RAPBN 2026 adalah APBN pertama yang benar-benar merefleksikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dokumen itu menempatkan RAPBN 2026 sebagai instrumen untuk mewujudkan “kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi,” sekaligus menegaskan bahwa desain fiskalnya tetap ekspansif tetapi sehat, terarah, dan terukur. Tetapi dalam proses pembahasan dengan DPR, postur anggaran mengalami perubahan. Pemerintah dan Badan Anggaran DPR kemudian menyepakati postur dengan **defisit Rp689,1 triliun** atau sekitar **2,68 persen dari PDB**, dengan target pendapatan negara **Rp3.153,6 triliun** dan belanja negara **Rp3.842,7 triliun**. Perubahan ini penting karena menunjukkan bahwa politik anggaran di Indonesia tidak hanya dibentuk oleh preferensi eksekutif, tetapi juga oleh tawar-menawar legislatif dan tekanan kebutuhan belanja yang lebih besar daripada rancangan awal. (media.kemenkeu.go.id)

Di sinilah esensi politik anggaran menjadi sangat nyata. Defisit bukan sekadar angka teknis; ia adalah hasil kompromi antara ambisi pembangunan, kehendak distribusi, dan toleransi terhadap risiko fiskal. Secara formal, Indonesia masih menjaga defisit di bawah batas legal **3 persen dari PDB**, yang selama ini menjadi jangkar penting kredibilitas fiskal. Tetapi berada di bawah batas hukum tidak otomatis berarti seluruh struktur anggaran berada dalam kondisi tanpa risiko. Batas 3 persen adalah pagar; sedangkan kualitas fiskal ditentukan oleh banyak hal lain: komposisi belanja, elastisitas penerimaan, biaya utang, kualitas implementasi, dan kemampuan negara menghasilkan pertumbuhan yang benar-benar memperluas basis pajak. Karena itu, perdebatan yang sehat seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah defisit masih legal, melainkan bergerak ke pertanyaan yang lebih substantif: apakah defisit tersebut membiayai masa depan, atau hanya membeli ketenangan politik jangka pendek? ([Reuters](#))

Realisasi awal tahun 2026 memberi sinyal penting tentang bagaimana ketegangan itu bekerja dalam praktik. Menurut **APBN Kita Februari 2026**, hingga 31 Januari 2026 pendapatan negara mencapai **Rp172,7 triliun**, naik **9,5 persen** secara tahunan, sedangkan belanja negara mencapai **Rp227,3 triliun**, tumbuh **25,7 persen**. Akibatnya, APBN mencatat **defisit Rp54,6 triliun**, atau sekitar **0,21 persen dari PDB**, hanya dalam satu bulan pertama. Data resmi yang sama juga menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak yang cukup tinggi, tetapi laju pertumbuhan belanja tetap lebih cepat. Bagi seorang ekonom fiskal, angka-angka ini memberi sinyal awal bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun di mana negara sangat aktif membelanjakan dana untuk mendorong agenda prioritas. Bagi seorang analis politik, data yang sama mengandung pesan lain: pemerintah sedang berupaya memperlihatkan kehadiran yang cepat dan konkret melalui anggaran. Dengan kata lain, politik anggaran sedang bergerak dari sekadar perencanaan ke demonstrasi kapasitas politik negara. (media.kemenkeu.go.id)

Salah satu penggerak utama lonjakan belanja itu adalah program **makan bergizi gratis**. Dalam publikasi resmi Kementerian Keuangan, belanja barang Januari 2026 meningkat tajam terutama karena pelaksanaan MBG sebesar **Rp19,5 triliun** pada bulan tersebut; sementara belanja bansos juga meningkat secara tahunan, antara lain karena percepatan penyaluran bantuan sosial. Reuters juga melaporkan bahwa biaya program makan gratis menjadi faktor utama yang mendorong lonjakan pengeluaran pemerintah pada Januari 2026, dan program itu telah diperluas hingga menjangkau lebih dari **60 juta penerima** pada akhir Februari dengan target sekitar **83 juta** penerima. Program ini karenanya menjadi contoh paling menonjol tentang bagaimana prioritas sosial, legitimasi politik, dan tekanan fiskal bertemu dalam satu kebijakan. Ia mudah dipahami oleh publik, memiliki simbolisme yang kuat, berhubungan langsung dengan anak sekolah dan keluarga, dan karena itu mempunyai daya resonansi politik yang sangat besar. Tetapi justru karena skalanya masif, program semacam ini menuntut disiplin desain yang jauh lebih tinggi daripada program biasa. (media.kemenkeu.go.id)

Menariknya, dinamika MBG juga menunjukkan perbedaan antara logika politik dan logika administratif. Pada pertengahan 2025, Reuters melaporkan bahwa serapan anggaran untuk program ini masih sangat rendah: hingga 12 Juni 2025, pemerintah baru membelanjakan **Rp4,4 triliun**, atau sekitar **2,6 persen** dari alokasi **Rp171 triliun**, dengan jangkauan sekitar **4,9 juta penerima** dan target puluhan juta penerima pada akhir tahun. Fakta ini mengajarkan dua hal. Pertama, kebijakan yang sangat kuat secara politik belum tentu mudah diimplementasikan secara birokratis. Kedua, dalam politik anggaran, kecepatan pengumuman sering kali lebih tinggi daripada kecepatan penyerapan. Dari sudut pandang akademik, hal ini penting: populisme fiskal bukan hanya soal program populer, tetapi juga soal ketimpangan antara **janji distribusi** dan **kapasitas pelaksanaan**. Suatu program dapat memiliki legitimasi sosial yang kuat, tetapi tetap memerlukan kesiapan logistik,

tata kelola data penerima, standar gizi, rantai pasok, dan sistem pengawasan yang tidak sederhana. ([Reuters](#))

Di sinilah perdebatan seharusnya dibuat lebih cerdas. Persoalan utamanya bukan apakah pemerintah boleh memiliki program yang populer. Tentu boleh, bahkan dalam demokrasi itu wajar. Persoalan yang lebih penting adalah: **apakah program populer tersebut juga program publik yang baik?** Sebuah kebijakan yang menysasar gizi anak, kesehatan ibu hamil, atau perlindungan sosial jelas memiliki argumen normatif yang kuat. Di banyak negara, belanja terhadap manusia dipandang sebagai bentuk investasi, bukan konsumsi belaka. Anak yang lebih sehat berpotensi menjadi siswa yang lebih siap belajar; rumah tangga miskin yang lebih terlindungi lebih mungkin mempertahankan konsumsi dasar; dan masyarakat yang merasa hadirnya negara secara konkret cenderung memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap institusi. Dari sudut pandang ini, politik anggaran yang menaruh perhatian pada dimensi sosial bukanlah kelemahan, melainkan syarat negara yang beradab.

Akan tetapi, justru karena tujuan sosialnya mulia, kebijakan seperti itu tidak boleh dipertahankan dengan logika anti-kritik. Dalam beberapa kasus, kebijakan sosial yang sangat populer dapat berkembang menjadi "sakral secara politik", sehingga kritik terhadap efisiensi, target, atau pembiayaan dianggap sebagai penolakan terhadap tujuan moral kebijakan itu sendiri. Ini adalah jebakan berbahaya. Di dalam tata kelola yang sehat, kita harus dapat membedakan **tujuan** dari **cara**. Tujuannya mungkin sangat layak—misalnya perbaikan gizi dan pengurangan kerentanan rumah tangga—tetapi caranya tetap harus diuji secara ketat: apakah targetnya tepat? apakah biayanya sepadan? apakah ada kebocoran? apakah lebih baik universal atau terarah? apakah ada dampak substitusi terhadap belanja prioritas lain? Dalam arti itu, disiplin fiskal bukan lawan dari prioritas sosial, melainkan mekanisme untuk

memastikan bahwa prioritas sosial tidak jatuh menjadi slogan mahal dengan hasil yang tipis.

Salah satu titik paling krusial dalam politik anggaran Indonesia adalah sisi penerimaan. Belanja negara selalu lebih mudah diumumkan daripada penerimaan negara diperkuat. Program belanja bisa diluncurkan dengan narasi moral dan simbolik yang kuat, sedangkan reformasi penerimaan—terutama perpajakan—sering kali bersifat teknis, rumit, dan berisiko menimbulkan resistensi. Karena itu, banyak negara menghadapi masalah klasik: tuntutan terhadap negara meningkat jauh lebih cepat daripada kapasitas negara memobilisasi pendapatan secara berkelanjutan.

Indonesia pun berada dalam ketegangan yang sama. Dalam APBN 2026, target pendapatan negara ditetapkan **Rp3.153,6 triliun**; artinya ruang untuk membiayai agenda sosial bergantung pada kemampuan ekonomi bertumbuh, kepatuhan pajak membaik, penerimaan nonpajak stabil, dan pembiayaan tetap terkendali. Realisasi Januari 2026 menunjukkan pertumbuhan penerimaan pajak yang kuat, tetapi dari perspektif fiskal jangka menengah, satu bulan yang baik tidak cukup. Yang dibutuhkan adalah perbaikan basis penerimaan yang konsisten, bukan sekadar windfall atau akselerasi sesaat. (media.kemenkeu.go.id)

Dari sini terlihat bahwa disiplin fiskal sesungguhnya memiliki dimensi etis. Dalam perdebatan publik, disiplin fiskal kadang dibayangkan secara negatif, seolah-olah ia hanya berarti penghematan, pembatasan belanja, atau sikap pro-pasar yang dingin terhadap kebutuhan rakyat. Pandangan ini terlalu sempit. Disiplin fiskal pada hakikatnya adalah komitmen agar negara tidak menjanjikan lebih dari yang dapat dibiayai secara berkelanjutan. Ia melindungi generasi berikutnya dari pembebanan utang yang tidak produktif; ia menjaga agar pembiayaan negara tidak tersedot habis untuk menambal program jangka pendek; dan ia mencegah situasi ketika tekanan fiskal akhirnya memaksa negara memotong program sosial yang justru sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan kata lain, disiplin fiskal yang sehat bukan anti-rakyat; sebaliknya,

ia sering kali merupakan prasyarat agar kebijakan pro-rakyat dapat bertahan lebih lama.

Karena itu, kesalahan besar dalam membaca politik anggaran adalah mempertentangkan secara biner antara “rakyat” dan “disiplin fiskal”, seolah-olah keduanya selalu berlawanan. Pertentangan yang lebih tepat justru antara **belanja yang berdampak** dan **belanja yang sekadar mengesankan**. Ada belanja yang kelihatan besar tetapi dampaknya tipis karena salah sasaran, biaya administrasinya tinggi, atau efeknya cepat menguap. Sebaliknya, ada belanja yang dari luar tampak biasa tetapi sangat menentukan kualitas pembangunan—misalnya penguatan layanan dasar, data sosial yang rapi, distribusi pangan yang efisien, atau investasi pada irigasi, kesehatan primer, dan pendidikan berkualitas. Politik anggaran yang matang seharusnya mampu menahan godaan spektakel dan lebih menekankan hasil. Ini tidak mudah, sebab sistem demokrasi selalu memberi insentif pada hal-hal yang cepat terlihat. Tetapi justru di situlah kualitas kepemimpinan diuji: apakah pemimpin berani menjelaskan bahwa tidak semua yang populer itu produktif, dan tidak semua yang sunyi itu tidak penting.

Dalam praktik Indonesia, belanja sosial juga harus dibaca bersama kebutuhan belanja lain yang tidak kalah mendesak. APBN 2026 memikul beban simultan: perlindungan sosial, ketahanan pangan, infrastruktur tertentu, pendidikan, pertahanan, transfer ke daerah, serta berbagai agenda prioritas pemerintahan baru. Ketika satu program tumbuh sangat besar, pertanyaan tentang **trade-off** menjadi tak terelakkan. Apakah ruang fiskal untuk sektor lain menyempit? Apakah ada crowding out terhadap investasi jangka panjang? Apakah belanja yang semestinya memperkuat produktivitas justru tertunda? Politik anggaran yang sehat tidak menolak prioritas sosial, tetapi selalu menguji biaya peluangnya. Dalam bahasa sederhana: setiap rupiah yang dibelanjakan untuk satu tujuan berarti rupiah itu tidak dapat digunakan untuk tujuan lain. Karena itu, keberanian politik yang sesungguhnya bukan hanya keberanian

menambah belanja, melainkan keberanian menetapkan prioritas secara jujur dan menjelaskan pengorbanannya kepada publik. (kemenkeu.go.id)

Aspek lain yang tak kalah penting adalah hubungan antara eksekutif dan legislatif. Proses pembentukan APBN 2026 memperlihatkan bahwa parlemen bukan sekadar stempel. Kenaikan postur defisit dari rancangan awal ke angka yang kemudian disepakati bersama menunjukkan bahwa pembahasan anggaran adalah arena politik institusional, tempat preferensi sektoral, kepentingan daerah, dan kebutuhan legitimasi bertemu. Reuters melaporkan bahwa dalam pembahasan di DPR, anggaran 2026 bertambah antara lain karena peningkatan dana untuk pemerintah daerah setelah muncul kekhawatiran dari daerah terkait kemungkinan tekanan fiskal dan kebijakan pajak. Ini memperlihatkan satu hal penting: dalam negara desentralisasi seperti Indonesia, politik anggaran nasional juga selalu merupakan politik koalisi antarpusat dan daerah. APBN bukan sekadar dokumen Jakarta; ia adalah kontrak politik yang memengaruhi hubungan negara dengan berbagai level pemerintahan dan kelompok masyarakat. ([Reuters](https://www.reuters.com))

Dalam konteks tersebut, populisme tidak selalu datang hanya dari pusat. Ia juga dapat hadir sebagai tuntutan kolektif dari berbagai aktor yang semuanya memiliki klaim legitimasi. Daerah meminta ruang fiskal lebih besar, kementerian menginginkan programnya tidak dipotong, kelompok sosial menuntut perlindungan yang lebih nyata, parlemen menginginkan hasil yang dapat ditunjukkan kepada konstituen, dan pemerintah pusat membutuhkan kebijakan yang terasa langsung oleh publik. Bila semua tekanan ini dipenuhi secara simultan tanpa disiplin prioritas, anggaran akan terdorong ke arah ekspansi yang tampak inklusif tetapi rapuh. Karena itu, seni utama dalam politik anggaran bukan sekadar membagi kue, melainkan menata urutan prioritas berdasarkan manfaat sosial, daya ungkit ekonomi, dan kapasitas pembiayaan.

Apa yang seharusnya dilakukan agar politik anggaran Indonesia tidak terjebak di antara populisme fiskal dan kekakuan teknokratis? Pertama, negara memerlukan **kerangka evaluasi berbasis hasil** yang lebih kuat. Program besar yang populer harus dinilai bukan hanya dari jumlah serapan dan penerima, tetapi juga dari perubahan nyata yang ditimbulkan: perbaikan status gizi, ketahanan rumah tangga, hasil belajar, penurunan stunting, atau peningkatan produktivitas. Kedua, perlu ada **transparansi fiskal yang komunikatif**. Publik berhak tahu bukan hanya berapa besar suatu program, tetapi dari mana sumber pembiayaannya, apa biaya peluangnya, dan bagaimana keberlanjutannya dijaga. Ketiga, reformasi penerimaan harus diperlakukan sebagai bagian integral dari keadilan sosial. Negara yang ingin banyak memberi harus juga mampu menghimpun pendapatan secara adil, efisien, dan kredibel. Keempat, desain belanja perlu semakin membedakan antara bantuan jangka pendek, investasi manusia jangka menengah, dan belanja simbolik. Semua memiliki tempatnya, tetapi porsinya tidak boleh tertukar.

Kelima, politik anggaran membutuhkan keberanian untuk mengakui keterbatasan. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi secara politik sangat sulit. Dalam budaya politik yang kompetitif, selalu ada insentif untuk menjanjikan lebih banyak, lebih cepat, dan lebih besar. Namun negara yang dewasa justru adalah negara yang mampu mengatakan: tujuan sosial kita besar, tetapi implementasi harus bertahap; kepedulian kita tinggi, tetapi desain harus presisi; komitmen kita kuat, tetapi pembiayaan harus masuk akal. Kematangan seperti itu penting agar kebijakan publik tidak berubah menjadi siklus euforia, ekspansi, tekanan fiskal, lalu koreksi mendadak. Keberlanjutan kebijakan sering kali lebih berharga daripada kemegahan peluncuran kebijakan.

Pada akhirnya, politik anggaran di Indonesia harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan tiga tuntutan yang sama-sama sah. Pertama, negara membutuhkan **legitimasi demokratis**, dan salah satu cara

membanggunya adalah melalui kebijakan yang langsung dirasakan rakyat. Kedua, negara mempunyai **kewajiban sosial** untuk melindungi warga, terutama kelompok rentan, melalui belanja yang bermutu dan tepat sasaran. Ketiga, negara harus menjaga **disiplin fiskal**, sebab tanpa itu semua komitmen sosial dapat kehilangan landasan pembiayaan. Ketiga unsur ini tidak perlu dipertentangkan secara ideologis. Justru tugas pemimpin dan pembuat kebijakan ialah merangkainya menjadi sintesis: anggaran yang berpihak pada rakyat, tetapi tidak sembrono; anggaran yang ambisius, tetapi tidak ilusif; anggaran yang politis, tetapi tidak terperangkap oleh populisme sempit.

Dengan demikian, esensi persoalan bukanlah memilih antara populisme, prioritas sosial, atau disiplin fiskal secara mutlak. Persoalannya adalah bagaimana membangun **politik anggaran yang bertanggung jawab**. Politik anggaran yang baik bukan anggaran yang steril dari pertimbangan politik—itu mustahil dalam demokrasi. Politik anggaran yang baik adalah anggaran yang berani menaruh rakyat di pusat perhatian, namun tetap tunduk pada logika keberlanjutan, evaluasi, dan akuntabilitas. Dalam bahasa yang lebih sederhana: negara boleh dan perlu hadir secara besar, tetapi kehadiran itu harus cerdas. Sebab pada akhirnya, bukan besar kecilnya anggaran yang menentukan kualitas suatu pemerintahan, melainkan kemampuan mengubah anggaran menjadi kesejahteraan yang nyata tanpa menggadaikan masa depan fiskal bangsa. (media.kemenkeu.go.id)

Daftar rujukan ringkas

Kementerian Keuangan RI, **Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2026**. (media.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan RI, **APBN Kita Februari 2026**. (media.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan RI, **Pemerintah dan Banggar DPR Sepakati Usulan Postur APBN 2026.** (kemenkeu.go.id)

Reuters, **Indonesia's government spending jumps 26% in January** (23 Februari 2026). ([Reuters](#))

Reuters, **Indonesia to go ahead with free meals programme...** (13 Februari 2026). ([Reuters](#))

Reuters, **Indonesia disburses less than 3% of budget for Prabowo's flagship free meals programme** (17 Juni 2025). ([Reuters](#))

Reuters, **Indonesia parliament passes / approves 2026 budget** (September 2025). ([Reuters](#))

VERSI Akademik

Politik Anggaran di Indonesia: Antara Populisme, Prioritas Sosial, dan Disiplin Fiskal

Abstrak

Makalah ini membahas politik anggaran di Indonesia sebagai arena yang mempertemukan kepentingan legitimasi politik, prioritas kesejahteraan sosial, dan tuntutan disiplin fiskal. Argumen utama tulisan ini adalah bahwa anggaran negara tidak pernah bersifat netral; ia selalu merefleksikan pilihan politik tentang siapa yang diprioritaskan, sektor mana yang diperkuat, dan risiko fiskal seperti apa yang dianggap dapat ditoleransi. Dalam konteks Indonesia mutakhir, ketegangan tersebut terlihat jelas dalam desain RAPBN 2026, perubahan postur APBN 2026 dalam pembahasan dengan DPR, serta realisasi awal 2026 yang

menunjukkan lonjakan belanja negara dan tekanan defisit pada bulan pertama tahun anggaran. Program makan bergizi gratis menjadi contoh penting untuk membaca bagaimana kebijakan sosial yang kuat secara politik dapat sekaligus menjadi instrumen legitimasi, intervensi sosial, dan sumber tekanan pada ruang fiskal. Makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi dokumen resmi dan laporan kebijakan untuk menunjukkan bahwa politik anggaran yang sehat tidak seharusnya memilih secara biner antara keberpihakan sosial dan kehati-hatian fiskal. Sebaliknya, negara membutuhkan sintesis kebijakan: anggaran yang berpihak kepada rakyat, tetapi tetap berbasis evaluasi, ketepatan sasaran, transparansi, dan keberlanjutan pembiayaan. Tanpa sintesis tersebut, politik anggaran berisiko terjebak pada populisme fiskal jangka pendek yang melemahkan kapasitas negara dalam jangka menengah.

Kata kunci: politik anggaran, populisme fiskal, prioritas sosial, disiplin fiskal, APBN Indonesia

1. Pendahuluan

Anggaran negara adalah dokumen ekonomi yang paling politis. Di dalamnya, negara bukan hanya menghitung penerimaan dan pengeluaran, melainkan juga menetapkan prioritas, membagi beban, menentukan penerima manfaat, dan menegaskan arah pembangunan. Oleh sebab itu, APBN tidak dapat dibaca sekadar sebagai perangkat teknokratis, tetapi harus dipahami pula sebagai arena politik tempat visi pemerintahan, tekanan sosial, kepentingan birokrasi, dan batas-batas ekonomi makro berinteraksi.

Dalam konteks Indonesia, arti strategis politik anggaran terlihat semakin nyata pada transisi menuju APBN 2026. Pemerintah, dalam Nota

Keuangan RAPBN 2026, mula-mula merancang pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, belanja negara Rp3.786,5 triliun, dan defisit anggaran Rp638,8 triliun atau 2,48 persen dari PDB. RAPBN ini diposisikan untuk mendukung agenda “kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi,” termasuk penguatan program makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan desa. (media.kemenkeu.go.id)

Namun, proses politik anggaran tidak berhenti pada rancangan pemerintah. Dalam pembahasan dengan DPR, postur APBN 2026 bergeser menjadi pendapatan negara Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, dan defisit Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen dari PDB. Kenaikan ini menunjukkan bahwa APBN adalah hasil negosiasi politik, bukan sekadar derivasi dari model fiskal. Ia mengandung kompromi antara agenda prioritas pemerintah, aspirasi parlemen, kebutuhan daerah, dan pertimbangan stabilitas ekonomi. ([Reuters](https://www.reuters.com))

Tegangan antara prioritas sosial dan disiplin fiskal juga tampak dalam realisasi APBN pada awal 2026. Hingga 31 Januari 2026, pendapatan negara tercatat Rp172,7 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp227,3 triliun, sehingga APBN mengalami defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Belanja barang melonjak, antara lain karena pelaksanaan makan bergizi gratis sebesar Rp19,5 triliun pada Januari, sementara belanja bantuan sosial juga meningkat secara tahunan. Data ini menunjukkan bagaimana agenda kesejahteraan sosial yang kuat secara politik dapat langsung tercermin pada struktur belanja negara. (media.kemenkeu.go.id)

Makalah ini berangkat dari pertanyaan pokok: **bagaimana politik anggaran di Indonesia mempertemukan, menegosiasikan, dan kadang mempertentangkan populisme, prioritas sosial, dan disiplin fiskal?** Dari pertanyaan ini lahir beberapa sub-pertanyaan: pertama, bagaimana APBN berfungsi sebagai arena politik distribusi? Kedua, kapan kebijakan sosial dapat disebut sebagai prioritas strategis, dan

kapan ia berubah menjadi populisme fiskal? Ketiga, mengapa disiplin fiskal tetap penting dalam negara yang ingin hadir secara aktif bagi masyarakat? Keempat, bagaimana kasus APBN 2026 dan program makan bergizi gratis memperlihatkan dinamika tersebut dalam praktik?

Makalah ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa politik anggaran yang sehat tidak boleh dibaca secara dikotomis. Negara tidak harus memilih antara berpihak kepada rakyat atau menjaga disiplin fiskal. Tantangan sesungguhnya adalah membangun anggaran yang adil secara sosial, efektif secara administratif, dan berkelanjutan secara fiskal. Dengan kata lain, kualitas politik anggaran tidak ditentukan oleh besar-kecilnya belanja semata, melainkan oleh kemampuannya mengubah sumber daya fiskal menjadi kesejahteraan nyata tanpa menggerus fondasi keuangan negara.

2. Landasan Konseptual

2.1 Politik anggaran sebagai arena distribusi

Dalam pengertian paling mendasar, anggaran negara adalah keputusan tentang alokasi sumber daya yang terbatas. Ketika negara memilih meningkatkan subsidi tertentu, memperluas bantuan sosial, menambah belanja pertahanan, atau menunda proyek infrastruktur, negara sesungguhnya sedang melakukan tindakan politik. Politik anggaran dengan demikian berkaitan erat dengan pertanyaan klasik: **siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana.**

Dalam negara demokratis, politik anggaran merupakan hasil interaksi antara pemerintah, parlemen, birokrasi, pasar, dan masyarakat. Pemerintah memerlukan dukungan politik dan legitimasi publik; parlemen membawa aspirasi elektoral dan kepentingan daerah; birokrasi memiliki kepentingan sektoral; sementara masyarakat menilai negara

dari kapasitasnya menjawab kebutuhan konkret. Karena itu, anggaran hampir selalu merupakan hasil kompromi yang tidak sepenuhnya ekonomis ataupun sepenuhnya politis.

2.2 Populisme fiskal

Dalam makalah ini, populisme fiskal dipahami sebagai kecenderungan menggunakan instrumen fiskal untuk memperoleh dukungan publik jangka pendek melalui program-program yang sangat populer, mudah dipahami, dan langsung terasa manfaatnya, tetapi belum tentu ditopang oleh desain pembiayaan, tata kelola, dan evaluasi yang memadai. Populisme fiskal tidak selalu identik dengan kebijakan yang buruk; ia menjadi problematik ketika program yang populer dibangun lebih sebagai alat legitimasi politik daripada sebagai kebijakan publik yang efektif.

Logika populisme fiskal biasanya sederhana. Manfaat diumumkan segera, biaya fiskal tersebar ke masa depan. Dalam sistem politik yang kompetitif, insentif untuk meluncurkan kebijakan yang cepat terlihat sering kali lebih kuat daripada insentif untuk menjalankan reformasi struktural yang hasilnya lambat dan tidak mudah dipasarkan secara politik.

2.3 Prioritas sosial

Tidak semua belanja yang populer adalah populis. Negara modern memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk melindungi kelompok rentan, memperbaiki kualitas hidup warga, dan mengatasi kegagalan pasar. Belanja sosial dapat disebut prioritas strategis apabila ia menysasar masalah publik yang nyata, memiliki target yang jelas, didukung tata kelola yang memadai, dan memberi dampak jangka menengah atau panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Dalam pengertian ini, belanja untuk gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pengurangan kemiskinan dapat menjadi

investasi manusia. Yang menentukan bukan hanya popularitas programnya, tetapi mutu desain kebijakan dan konsistensinya dengan kemampuan fiskal negara.

2.4 Disiplin fiskal

Disiplin fiskal bukan sekadar obsesi terhadap penghematan. Dalam arti substantif, disiplin fiskal adalah kemampuan negara menjaga kesinambungan antara ambisi belanja, kapasitas penerimaan, pembiayaan, dan stabilitas ekonomi. Disiplin fiskal melindungi negara dari jebakan menjanjikan terlalu banyak tanpa sumber pembiayaan yang sehat. Ia juga menjaga agar agenda sosial tidak runtuh oleh krisis keuangan yang disebabkan oleh ekspansi fiskal yang tidak terkendali.

Dengan demikian, disiplin fiskal tidak berlawanan dengan keberpihakan sosial. Sebaliknya, ia justru menjadi prasyarat agar komitmen sosial dapat berumur panjang.

3. Metode Penulisan

Makalah ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan menitikberatkan pada analisis dokumen dan interpretasi kebijakan. Sumber utama yang dipakai adalah Nota Keuangan RAPBN 2026, publikasi APBN Kita Februari 2026, serta laporan kebijakan dan pemberitaan ekonomi yang mendokumentasikan perubahan postur APBN 2026 dan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dokumen resmi pemerintah dipakai untuk membaca postur fiskal, prioritas belanja, dan realisasi APBN; sedangkan laporan media digunakan untuk menangkap dinamika kebijakan dan respons terhadap implementasi. (media.kemenkeu.go.id)

Pendekatan ini dipilih karena isu politik anggaran bukan hanya persoalan angka, melainkan juga persoalan makna, prioritas, dan relasi kekuasaan.

Dengan demikian, analisis diarahkan bukan untuk membuat proyeksi ekonometrik, melainkan untuk menjelaskan bagaimana angka-angka fiskal memperoleh arti politik dalam konteks Indonesia kontemporer.

4. Pembahasan

4.1 APBN sebagai instrumen ekonomi sekaligus instrumen politik

Secara formal, APBN dirancang untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Namun dalam praktik kenegaraan, APBN juga merupakan instrumen legitimasi. Pemerintah yang ingin menunjukkan keberpihakan pada rakyat akan berusaha memastikan bahwa program-program unggulannya tampak nyata dalam struktur belanja. Itulah sebabnya APBN sering kali menjadi panggung pertama di mana arah sebuah pemerintahan dibaca publik.

RAPBN 2026 memperlihatkan hal itu dengan jelas. Pemerintah menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai tema besar, disertai penekanan pada makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan berkualitas, pembangunan desa, dan penguatan layanan publik. Rancangan defisit 2,48 persen dari PDB menunjukkan bahwa negara tetap ingin ekspansif, tetapi masih menjaga ruang di bawah batas 3 persen. Dengan demikian, sejak tahap perencanaan saja terlihat bahwa APBN 2026 dimaksudkan bukan hanya sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai pernyataan politik tentang prioritas pemerintahan baru. (media.kemenkeu.go.id)

Namun, politik anggaran tidak berhenti pada niat pemerintah. Ketika rancangan APBN dibahas bersama DPR, posturnya berubah. Pendapatan negara naik menjadi Rp3.153,6 triliun, belanja negara menjadi Rp3.842,7 triliun, dan defisit menjadi 2,68 persen dari PDB. Kenaikan ini menegaskan bahwa APBN adalah produk negosiasi antaraktor negara.

Dalam kasus ini, salah satu faktor yang disebut adalah peningkatan dana untuk pemerintah daerah setelah muncul kekhawatiran dari daerah mengenai tekanan fiskal. Artinya, anggaran nasional juga merupakan arena kompromi antara pusat dan daerah. ([Reuters](#))

Dari sini tampak bahwa angka defisit bukan sekadar angka teknis. Ia mencerminkan seberapa jauh negara bersedia memperluas intervensi sosial dan politiknya, sekaligus seberapa besar risiko fiskal yang masih dipandang dapat diterima. Politik anggaran, dengan demikian, adalah politik tentang prioritas dan toleransi risiko.

4.2 Populisme fiskal dan godaan program yang langsung terasa

Dalam demokrasi elektoral, pemerintah hampir selalu memiliki insentif untuk memperbesar program yang manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Kebijakan seperti bantuan langsung, subsidi, transfer tunai, atau program makan gratis mudah dikomunikasikan dan memiliki nilai simbolik yang tinggi. Di sisi lain, reformasi perpajakan, peningkatan kualitas data sosial, efisiensi birokrasi, dan evaluasi program jauh lebih sulit "dijual" secara politik meskipun efek jangka panjangnya sering lebih penting.

Program makan bergizi gratis menjadi ilustrasi yang sangat relevan. Pada Januari 2026, pengeluaran pemerintah untuk program ini mencapai Rp19,5 triliun, dan Reuters melaporkan bahwa biaya program tersebut menjadi faktor utama lonjakan belanja negara pada awal tahun. Program ini diperluas dengan cepat dan ditujukan kepada puluhan juta penerima, sehingga memiliki daya resonansi politik yang sangat tinggi. Ia menghubungkan negara dengan keluarga, anak sekolah, dan isu gizi; kombinasi yang secara politik sangat kuat. (media.kemenkeu.go.id)

Akan tetapi, data implementasi pada 2025 memperlihatkan bahwa program populer belum tentu mudah dijalankan secara administratif. Hingga 12 Juni 2025, pemerintah baru membelanjakan Rp4,4 triliun atau

2,6 persen dari alokasi Rp171 triliun untuk program tersebut, dengan cakupan sekitar 4,9 juta penerima, jauh di bawah target akhir tahun yang direncanakan sekitar 82,9 juta penerima. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara ambisi politik dan kapasitas pelaksanaan. Populisme fiskal sering kali tumbuh subur justru di ruang ini: program sangat kuat sebagai janji dan simbol, tetapi aparatus implementasinya tertinggal.

(Reuters)

Karena itu, kritik terhadap populisme fiskal tidak seharusnya dimaknai sebagai kritik terhadap seluruh kebijakan sosial. Kritik itu seharusnya diarahkan pada kecenderungan membangun legitimasi terutama melalui pengumuman program, bukan melalui hasil yang terukur. Dalam negara yang sehat, program sosial justru harus dinilai semakin ketat ketika ia sangat populer, sebab skala, biaya, dan ekspektasi publik terhadapnya juga jauh lebih besar.

4.3 Prioritas sosial sebagai keharusan moral dan politik

Negara tidak dapat menjadi sekadar penjaga neraca fiskal. Dalam masyarakat yang masih menghadapi masalah kemiskinan, ketimpangan, stunting, akses pendidikan, dan kerentanan rumah tangga, belanja sosial bukan sekadar pilihan politis, melainkan kebutuhan moral dan konstitusional. Oleh karena itu, politik anggaran tidak dapat dinilai hanya dari kerapian defisit, tetapi juga dari kemampuan negara menjangkau kebutuhan dasar warga.

Dalam perspektif ini, program makan bergizi gratis dapat dibaca sebagai bentuk prioritas sosial yang memiliki rasionalitas kuat. Isu gizi anak, kualitas pembelajaran, dan intervensi pada keluarga rentan memang merupakan masalah publik yang penting. Negara yang mengabaikan masalah tersebut akan kehilangan legitimasi moral. Karena itu, belanja sosial yang menyasar kualitas sumber daya manusia tidak boleh buru-buru dicap sebagai populisme semata.

Akan tetapi, prioritas sosial menjadi kokoh bila ia memenuhi syarat-syarat kebijakan publik yang baik: target jelas, manfaat terukur, pelaksanaan dapat diawasi, dan pembiayaan realistis. Tanpa syarat-syarat itu, prioritas sosial mudah tereduksi menjadi simbolisme fiskal. Dalam makna inilah, perdebatan sehat bukan terletak pada perlu atau tidaknya belanja sosial, melainkan pada bagaimana belanja sosial dirancang agar benar-benar menghasilkan perbaikan kesejahteraan.

Dengan kata lain, keberpihakan sosial harus dibedakan dari sekadar ekspansi sosial. Negara dapat membelanjakan lebih banyak tanpa menghasilkan dampak lebih besar apabila kebijakan tidak tepat sasaran, terlalu tersentralisasi, atau tidak didukung oleh tata kelola yang cermat. Kualitas prioritas sosial akhirnya bergantung pada kesediaan negara menempatkan evaluasi, bukan sekadar popularitas, sebagai ukuran keberhasilan.

4.4 Disiplin fiskal sebagai syarat keberlanjutan

Dalam debat publik, disiplin fiskal sering diasosiasikan dengan pengurangan belanja atau logika teknokratis yang tidak peka pada penderitaan sosial. Pandangan ini tidak sepenuhnya tepat. Disiplin fiskal pada dasarnya adalah upaya menjaga agar komitmen sosial negara tidak melebihi kapasitas pembiayaan yang sehat. Negara yang terlalu jauh mengekspansi belanja tanpa memperkuat basis penerimaan pada akhirnya menghadapi tekanan utang, pembiayaan yang makin mahal, atau pemotongan belanja mendadak di masa depan.

RAPBN 2026 dirancang dengan defisit 2,48 persen dari PDB, tetapi dalam pembahasan dengan DPR meningkat menjadi 2,68 persen dari PDB. Secara hukum, angka ini masih berada di bawah batas 3 persen. Namun dari sudut pandang kebijakan, keberadaan di bawah ambang legal tidak otomatis berarti risiko fiskal rendah. Struktur belanja, kapasitas penerimaan, biaya utang, serta ketahanan ekonomi terhadap guncangan global tetap harus diperhitungkan. Reuters bahkan

melaporkan bahwa lembaga pemeringkat Fitch sedang meninjau posisi fiskal Indonesia setelah Moody's sebelumnya menurunkan outlook menjadi negatif. Ini menandakan bahwa pasar dan lembaga penilai memperhatikan dengan serius kualitas ekspansi fiskal Indonesia.

([Reuters](#))

Data Januari 2026 juga memperlihatkan bahwa pendapatan negara memang tumbuh, tetapi belanja tumbuh lebih cepat. Pendapatan mencapai Rp172,7 triliun, naik 9,5 persen secara tahunan, sedangkan belanja mencapai Rp227,3 triliun, naik 25,7 persen. Defisit Rp54,6 triliun pada bulan pertama memang masih "terkendali" dalam bahasa resmi pemerintah, tetapi ia juga mengirim pesan bahwa ruang fiskal akan sangat bergantung pada kemampuan mempertahankan pertumbuhan penerimaan sepanjang tahun. Dalam situasi seperti ini, disiplin fiskal seharusnya dipahami sebagai kewaspadaan, bukan sebagai penolakan terhadap belanja sosial. (media.kemenkeu.go.id)

Dengan demikian, disiplin fiskal memiliki dimensi etis. Ia melindungi generasi mendatang dari beban kebijakan jangka pendek yang tidak produktif. Ia juga menjaga agar program-program prioritas tidak berhenti di tengah jalan karena pembiayaannya rapuh. Dalam perspektif ini, fiskal yang sehat justru memperpanjang umur kebijakan sosial yang baik.

4.5 Sisi penerimaan: titik lemah yang sering diabaikan

Dalam politik anggaran, belanja selalu lebih menarik perhatian publik daripada penerimaan. Program yang membagikan manfaat lebih mudah dijelaskan daripada reformasi perpajakan yang rumit dan sering menimbulkan resistensi. Akibatnya, banyak pemerintahan menghadapi masalah klasik: tuntutan terhadap negara meningkat lebih cepat daripada kemampuan negara menghimpun pendapatan secara berkelanjutan.

Dalam RAPBN 2026, target pendapatan negara ditetapkan Rp3.147,7 triliun, lalu meningkat menjadi Rp3.153,6 triliun pada postur yang disepakati bersama DPR. Angka ini menunjukkan bahwa perluasan agenda sosial dan pembangunan menuntut penguatan sisi penerimaan. Bila negara terus menambah komitmen belanja tanpa memperkuat basis pajak dan penerimaan nonpajak, maka ruang fiskal akan semakin sempit dan ketergantungan pada pembiayaan akan meningkat.

(media.kemenkeu.go.id)

Realisasi Januari 2026 memang menunjukkan kabar positif bahwa penerimaan pajak tumbuh tinggi. Namun pertumbuhan satu bulan tidak cukup untuk menyimpulkan ketahanan fiskal sepanjang tahun. Yang lebih penting adalah apakah pertumbuhan tersebut mencerminkan basis penerimaan yang semakin kuat, atau hanya faktor temporer. Politik anggaran yang matang harus menempatkan reformasi penerimaan sebagai pasangan alami dari perluasan belanja sosial. Negara yang ingin lebih hadir harus pula lebih mampu menghimpun sumber daya secara adil dan efisien.

Dengan kata lain, keberpihakan fiskal kepada rakyat harus ditopang oleh keberanian politik untuk memperkuat penerimaan negara. Tanpa itu, ekspansi sosial berisiko menjadi rapuh.

4.6 Menyatukan tiga tuntutan: legitimasi, keadilan sosial, dan keberlanjutan fiskal

Dari seluruh uraian di atas, tampak bahwa politik anggaran Indonesia bergerak di bawah tiga tuntutan yang sama-sama sah. Pertama, pemerintah membutuhkan legitimasi demokratis dan karena itu cenderung mendorong program yang langsung dirasakan masyarakat. Kedua, negara memiliki kewajiban sosial untuk melindungi warga dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Ketiga, negara harus menjaga disiplin fiskal agar seluruh komitmen itu dapat dibiayai secara berkelanjutan.

Masalah muncul ketika salah satu tuntutan mendominasi secara berlebihan. Bila legitimasi politik menjadi satu-satunya tujuan, anggaran bisa jatuh ke dalam populisme fiskal. Bila disiplin fiskal dipahami terlalu sempit, negara bisa kehilangan kepekaan sosial. Bila prioritas sosial dibangun tanpa tata kelola yang memadai, kebijakan bisa menjadi mahal tetapi tidak efektif. Tantangan terbesar, karena itu, bukan memilih salah satu, melainkan mengintegrasikan ketiganya.

Dalam konteks Indonesia, integrasi tersebut menuntut beberapa hal. Pertama, program sosial berskala besar harus dievaluasi dengan indikator hasil, bukan hanya serapan anggaran atau jumlah penerima. Kedua, perlu ada transparansi yang lebih komunikatif tentang sumber pembiayaan, biaya peluang, dan target capaian program. Ketiga, reformasi penerimaan harus diperlakukan sebagai bagian dari agenda keadilan sosial, bukan hanya agenda administrasi perpajakan. Keempat, pembahasan APBN di parlemen perlu semakin berorientasi pada kualitas manfaat publik, bukan sekadar penambahan alokasi. Kelima, negara harus berani menempatkan kebijakan yang tenang tetapi produktif—seperti data sosial yang baik, tata kelola distribusi, dan pengawasan implementasi—sebagai prioritas yang sama pentingnya dengan kebijakan yang populer.

Dengan demikian, politik anggaran yang bertanggung jawab adalah politik yang memahami bahwa keberpihakan pada rakyat dan kehati-hatian fiskal bukan dua hal yang saling membatalkan. Keduanya harus saling menopang.

5. Kesimpulan

Makalah ini menunjukkan bahwa politik anggaran di Indonesia merupakan medan pertemuan antara kepentingan legitimasi politik,

prioritas sosial, dan disiplin fiskal. APBN bukan dokumen netral, melainkan cermin pilihan negara mengenai siapa yang diprioritaskan, instrumen apa yang dipakai untuk memperoleh legitimasi, serta seberapa jauh risiko fiskal bersedia ditanggung untuk mendukung agenda pembangunan.

Kasus APBN 2026 memperlihatkan dinamika tersebut secara nyata. Rancangan awal pemerintah menekankan ekspansi yang tetap berada di bawah batas defisit 3 persen, namun pembahasan politik dengan DPR menghasilkan postur yang lebih besar dan defisit yang lebih tinggi. Realisasi Januari 2026 kemudian menunjukkan bahwa agenda prioritas sosial, khususnya makan bergizi gratis, langsung memberi pengaruh pada lonjakan belanja negara dan defisit awal tahun. Data implementasi 2025 juga mengingatkan bahwa program yang sangat kuat secara politik belum tentu mudah dijalankan secara administratif.

(media.kemenkeu.go.id)

Dari sini dapat ditarik tiga simpulan utama. Pertama, tidak semua kebijakan sosial yang populer dapat disebut populistik; banyak di antaranya justru merepresentasikan kebutuhan sosial yang nyata. Kedua, kebijakan sosial yang baik harus dibedakan dari kebijakan sosial yang semata-mata simbolik, dan pembeda utamanya adalah kualitas desain, ketepatan sasaran, dan ukuran hasil. Ketiga, disiplin fiskal bukan lawan dari keberpihakan sosial, melainkan syarat agar keberpihakan sosial itu dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, Indonesia memerlukan politik anggaran yang tidak terjebak pada pilihan biner. Negara harus berani hadir untuk rakyat, tetapi kehadiran itu harus berbasis evaluasi, tata kelola yang baik, transparansi pembiayaan, dan kehati-hatian fiskal. Politik anggaran yang dewasa bukanlah politik yang anti-populer, melainkan politik yang mampu mengubah popularitas kebijakan menjadi manfaat publik yang nyata tanpa mengorbankan masa depan fiskal bangsa.

Daftar Pustaka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2025.

(media.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Publikasi APBN Kita Februari 2026*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2026. (media.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "RAPBN Tahun Anggaran 2026: Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi." 15 Agustus 2025.

(anggaran.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. *Advertorial RAPBN 2026*. Jakarta: Kementerian Keuangan, 2025. (media.kemenkeu.go.id)

Reuters. "Indonesian Parliament Committee Approves 2026 Budget; Deficit Seen Higher at 2.68% of GDP." 18 September 2025. ([Reuters](https://www.reuters.com))

Reuters. "Indonesia's Government Spending Jumps 26% in January." 23 Februari 2026. ([Reuters](https://www.reuters.com))

Reuters. "Indonesia Disburses Less Than 3% of Budget for Prabowo's Flagship Free Meals Programme." 17 Juni 2025. ([Reuters](https://www.reuters.com))

VERSI JURNAL

Berikut versi yang sudah saya rapikan ke **format artikel jurnal/seminar**.

Politik Anggaran di Indonesia: Antara Populisme, Prioritas Sosial, dan Disiplin Fiskal

Rudy C. Tarumingkeng

Akademisi dan Penulis

Bogor, Indonesia

Abstrak

Tulisan ini menganalisis politik anggaran di Indonesia sebagai arena yang mempertemukan tiga kepentingan besar: legitimasi politik, prioritas sosial, dan disiplin fiskal. Argumen utama artikel ini adalah bahwa APBN tidak pernah sepenuhnya netral, karena ia selalu mencerminkan pilihan politik tentang siapa yang diprioritaskan, sektor apa yang diperkuat, dan risiko fiskal apa yang bersedia ditanggung negara. Dalam konteks Indonesia mutakhir, ketegangan itu tampak jelas dalam rancangan RAPBN 2026, perubahan postur APBN 2026 setelah pembahasan dengan DPR, serta realisasi awal tahun 2026 yang menunjukkan pertumbuhan belanja lebih cepat daripada pendapatan negara. Program makan bergizi gratis menjadi contoh penting karena sekaligus merepresentasikan keberpihakan sosial, instrumen legitimasi politik, dan sumber tekanan terhadap ruang fiskal. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis analisis dokumen kebijakan dan publikasi resmi, artikel ini menunjukkan bahwa politik anggaran yang sehat tidak dapat dibangun di atas pilihan biner antara keberpihakan sosial dan kehati-hatian fiskal. Yang dibutuhkan adalah sintesis: anggaran yang berpihak pada masyarakat, tetapi tetap berbasis evaluasi, ketepatan sasaran, transparansi, dan keberlanjutan pembiayaan. Tanpa sintesis tersebut, anggaran berisiko terjebak pada populisme fiskal jangka pendek yang justru melemahkan kapasitas negara dalam jangka menengah. Data resmi pemerintah menunjukkan RAPBN 2026 mula-mula dirancang dengan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, belanja negara Rp3.786,5 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB; setelah pembahasan politik, APBN 2026 disepakati dengan pendapatan Rp3.153,6 triliun, belanja Rp3.842,7 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB. Sementara itu, realisasi Januari 2026 mencatat pendapatan negara

Rp172,7 triliun, belanja Rp227,3 triliun, dan defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen PDB, dengan salah satu pendorong utama kenaikan belanja adalah program makan bergizi gratis. (media.kemenkeu.go.id)

Kata kunci: politik anggaran, APBN, populisme fiskal, prioritas sosial, disiplin fiskal, Indonesia

Abstract

This article examines budget politics in Indonesia as an arena where three major interests intersect: political legitimacy, social priorities, and fiscal discipline. The central argument is that the state budget is never entirely neutral, as it reflects political choices regarding who should be prioritized, which sectors should be strengthened, and what level of fiscal risk the state is willing to tolerate. In contemporary Indonesia, this tension is evident in the design of the 2026 draft state budget, the revised 2026 budget posture after parliamentary deliberation, and the early 2026 realization showing expenditure growth outpacing state revenue. The free nutritious meals program serves as an important example because it simultaneously represents social commitment, political legitimation, and pressure on fiscal space. Using a qualitative-descriptive approach based on policy documents and official publications, this article argues that sound budget politics cannot be framed as a binary choice between social commitment and fiscal prudence. What is needed instead is a synthesis: a budget that supports the people while remaining grounded in evaluation, targeting accuracy, transparency, and financing sustainability. Without such synthesis, budget policy risks falling into short-term fiscal populism that may weaken state capacity in the medium term. Official data show that the 2026 draft budget was initially proposed with state revenue of Rp3,147.7 trillion, expenditure of Rp3,786.5 trillion, and a deficit of Rp638.8 trillion or 2.48 percent of GDP; after political deliberation, the 2026 budget was approved with revenue of Rp3,153.6 trillion, expenditure of Rp3,842.7

trillion, and a deficit of 2.68 percent of GDP. Meanwhile, January 2026 realization recorded revenue of Rp172.7 trillion, expenditure of Rp227.3 trillion, and a deficit of Rp54.6 trillion or 0.21 percent of GDP, with the free meals program as one of the main drivers of expenditure growth. (media.kemenkeu.go.id)

1. Pendahuluan

Anggaran negara adalah dokumen ekonomi yang sekaligus merupakan dokumen politik. Di dalamnya, negara tidak hanya menghitung pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga menentukan prioritas, membentuk pesan politik, dan mendistribusikan manfaat kepada masyarakat. Karena itu, APBN selalu memuat pilihan normatif tentang siapa yang harus dilindungi, sektor apa yang layak diperkuat, dan tujuan pembangunan apa yang harus didahulukan.

Dalam konteks Indonesia, makna politik anggaran menjadi semakin menonjol pada pembentukan APBN 2026. Pemerintah menempatkan RAPBN 2026 sebagai instrumen untuk menopang “kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi,” sekaligus mendukung berbagai agenda prioritas seperti makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Postur awal RAPBN 2026 mencerminkan semangat ekspansif, tetapi tetap dijaga di bawah ambang defisit 3 persen dari PDB. Namun, dalam pembahasan dengan DPR, struktur itu mengalami penyesuaian: belanja diperbesar, pendapatan dinaikkan tipis, dan defisit bergerak dari 2,48 persen menjadi 2,68 persen dari PDB. Perubahan ini menunjukkan bahwa APBN adalah hasil negosiasi politik, bukan semata-mata hasil kalkulasi teknokratis. (media.kemenkeu.go.id)

Pada saat yang sama, realisasi APBN Januari 2026 memperlihatkan dinamika yang lebih konkret. Pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp227,3 triliun, sehingga APBN mengalami defisit Rp54,6 triliun atau 0,21 persen dari PDB. Publikasi resmi pemerintah dan laporan media internasional sama-sama

menunjukkan bahwa kenaikan belanja tersebut sangat dipengaruhi oleh perluasan program makan bergizi gratis, selain peningkatan bantuan sosial dan dorongan belanja pada triwulan pertama.

(media.kemenkeu.go.id)

Dari sini muncul pertanyaan akademik yang penting: bagaimana anggaran negara dibentuk di tengah ketegangan antara kebutuhan memperoleh legitimasi politik, kewajiban menjalankan prioritas sosial, dan tuntutan menjaga disiplin fiskal? Pertanyaan ini penting karena dalam demokrasi modern, negara dituntut hadir lebih aktif bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama tidak boleh kehilangan kehati-hatian fiskal yang menopang stabilitas jangka menengah.

Artikel ini berargumen bahwa politik anggaran di Indonesia sebaiknya tidak dibaca dalam kerangka hitam-putih antara "pro-rakyat" versus "pro-disiplin fiskal." Sebaliknya, politik anggaran yang matang justru menuntut sintesis antara keduanya. Keberpihakan sosial yang tidak berbasis evaluasi dapat jatuh ke dalam populisme fiskal, sedangkan disiplin fiskal yang terlalu sempit dapat mengerdilkan fungsi negara sebagai pelindung masyarakat. Karena itu, isu utama bukanlah apakah negara harus aktif atau hemat, melainkan bagaimana negara dapat aktif secara cerdas, adil, dan berkelanjutan.

2. Rumusan Masalah

Artikel ini berangkat dari tiga pertanyaan utama.

Pertama, bagaimana APBN di Indonesia berfungsi bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen politik distribusi dan legitimasi?

Kedua, bagaimana membedakan belanja sosial yang merupakan prioritas strategis dari belanja sosial yang cenderung populistik?

Ketiga, bagaimana disiplin fiskal dapat dipahami bukan sebagai lawan dari keberpihakan sosial, melainkan sebagai syarat keberlanjutan kebijakan publik?

3. Metode

Tulisan ini menggunakan pendekatan **kualitatif-deskriptif** dengan basis analisis dokumen. Sumber utama terdiri atas **Nota Keuangan RAPBN 2026, publikasi APBN Kita Februari 2026**, dan publikasi resmi Kementerian Keuangan mengenai postur APBN 2026. Untuk melengkapi dinamika kebijakan dan persepsi pasar, artikel ini juga menggunakan laporan Reuters mengenai realisasi defisit Januari 2026, perubahan postur APBN 2026 dalam pembahasan dengan DPR, dan perkembangan program makan bergizi gratis. Sumber-sumber ini dipilih karena memungkinkan pembacaan yang menyatukan dimensi angka fiskal dengan dimensi politik kebijakan. (media.kemenkeu.go.id)

4. Kerangka Konseptual

4.1 Politik anggaran

Politik anggaran dapat dipahami sebagai proses penentuan prioritas negara melalui alokasi sumber daya yang terbatas. Dalam pengertian ini, anggaran selalu terkait dengan distribusi kekuasaan, distribusi manfaat, dan distribusi risiko. Negara yang memperbesar belanja sosial, misalnya, bukan hanya sedang melakukan tindakan ekonomi, tetapi juga sedang menyampaikan pesan politik tentang keberpihakan.

4.2 Populisme fiskal

Populisme fiskal dalam artikel ini dipahami sebagai kecenderungan memperbesar atau menonjolkan belanja yang sangat populer dan cepat terasa manfaatnya, tetapi belum tentu sepenuhnya ditopang oleh pembiayaan yang kuat, tata kelola yang matang, atau evaluasi dampak yang memadai. Populisme fiskal menjadi problematik ketika logika popularitas lebih dominan daripada logika hasil kebijakan.

4.3 Prioritas sosial

Prioritas sosial merujuk pada pengeluaran negara yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, memperkuat perlindungan kelompok rentan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Belanja sosial tidak dapat otomatis disebut populistik, sebab dalam banyak kasus justru menjadi bentuk kewajiban moral dan konstitusional negara.

4.4 Disiplin fiskal

Disiplin fiskal adalah kemampuan negara menjaga kesinambungan antara belanja, penerimaan, pembiayaan, dan risiko makroekonomi. Dengan demikian, disiplin fiskal bukan sekadar upaya membatasi pengeluaran, tetapi juga menjaga agar komitmen sosial dapat dibiayai secara berkelanjutan.

5. Hasil dan Pembahasan

5.1 APBN sebagai arena distribusi dan legitimasi

RAPBN 2026 menunjukkan bahwa pemerintah ingin menggunakan APBN sebagai motor agenda prioritas nasional. Dalam dokumen Nota Keuangan, postur awal dirancang dengan pendapatan negara Rp3.147,7 triliun, belanja negara Rp3.786,5 triliun, dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen PDB. Penekanan utamanya mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan makan bergizi gratis. Dengan demikian, sejak awal RAPBN 2026 sudah mengandung makna politik: negara ingin hadir secara lebih langsung dan lebih kasatmata. (media.kemenkeu.go.id)

Tetapi dalam negara demokratis, niat eksekutif selalu berhadapan dengan proses politik di legislatif. Setelah pembahasan dengan DPR, belanja negara dinaikkan menjadi Rp3.842,7 triliun, pendapatan menjadi Rp3.153,6 triliun, dan defisit menjadi 2,68 persen PDB. Reuters melaporkan bahwa perubahan ini antara lain terkait peningkatan dana

untuk pemerintah daerah setelah muncul kekhawatiran mengenai tekanan fiskal di daerah. Ini menegaskan bahwa anggaran negara adalah hasil negosiasi banyak aktor, bukan sekadar rancangan tunggal pemerintah pusat. ([Reuters](#))

Dengan demikian, APBN di Indonesia dapat dipahami sebagai kontrak politik yang menghubungkan pemerintah pusat, parlemen, pemerintah daerah, birokrasi, dan masyarakat. Ia bukan sekadar dokumen akuntansi, melainkan arena kompromi antara visi pembangunan, kalkulasi elektoral, kebutuhan distribusi, dan pertimbangan stabilitas makro.

5.2 Program sosial populer: antara kebutuhan nyata dan godaan populisme

Salah satu ciri politik anggaran kontemporer adalah kecenderungan negara untuk menonjolkan program yang cepat terasa manfaatnya. Dalam konteks Indonesia, program makan bergizi gratis menjadi ilustrasi yang paling jelas. Program ini berkaitan langsung dengan isu gizi anak, pendidikan, keluarga, dan keberpihakan negara terhadap masyarakat bawah. Karena sifatnya sangat konkret, program semacam ini memiliki daya resonansi politik yang tinggi.

Pada Januari 2026, data resmi APBN Kita menunjukkan bahwa belanja barang meningkat tajam, dengan salah satu faktor utama adalah pelaksanaan makan bergizi gratis sebesar Rp19,5 triliun pada bulan itu. Reuters juga mencatat bahwa program ini menjadi pendorong utama lonjakan belanja pemerintah Januari 2026, di tengah defisit awal tahun sebesar Rp54,6 triliun. (media.kemenkeu.go.id)

Namun, data 2025 menunjukkan sisi lain dari kebijakan populer. Reuters melaporkan bahwa hingga pertengahan Juni 2025, serapan anggaran untuk program ini baru mencapai Rp4,4 triliun atau sekitar 2,6 persen dari alokasi Rp171 triliun, dengan cakupan sekitar 4,9 juta penerima—jauh di bawah target jangka lebih luas yang direncanakan pemerintah.

Fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan yang sangat kuat sebagai janji politik belum tentu mudah sebagai praktik administratif. Di sinilah perbedaan antara **program populer** dan **program publik yang matang** menjadi penting. ([Reuters](#))

Dari perspektif akademik, program semacam ini tidak tepat bila langsung dicap sebagai populisme semata. Ia dapat menjadi prioritas sosial yang legitimate karena menysasar persoalan publik yang nyata. Akan tetapi, ia berubah problematik bila popularitasnya tidak diimbangi oleh ketepatan target, kesiapan logistik, mekanisme evaluasi, dan keberlanjutan pembiayaan. Dengan kata lain, kritik terhadap populisme fiskal seharusnya tidak diarahkan pada tujuan sosial kebijakan, melainkan pada kelemahan desain dan tata kelolanya.

5.3 Prioritas sosial sebagai dimensi etis anggaran

Negara yang demokratis tidak dapat menghindar dari kewajiban sosial. Anggaran publik harus mencerminkan keberpihakan terhadap pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan kualitas manusia. Dalam kerangka ini, program-program sosial yang besar tidak bisa dipandang hanya dari sisi biaya, tetapi juga dari sisi manfaat jangka menengah dan panjang.

Pemerintah sendiri menempatkan APBN 2026 sebagai APBN yang “sehat, kredibel, dan berpihak pada rakyat,” dengan delapan agenda prioritas, termasuk makan bergizi gratis, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pembangunan desa, serta dukungan bagi koperasi dan UMKM. Artikulasi resmi ini menegaskan bahwa politik anggaran Indonesia sedang diarahkan untuk memperlihatkan negara yang lebih aktif secara sosial. ([Media Keuangan](#))

Tetapi justru karena prioritas sosial memiliki muatan moral yang kuat, ia tidak boleh dijadikan wilayah anti-kritik. Belanja sosial harus terus diuji melalui indikator hasil. Pertanyaannya bukan hanya “berapa besar

anggaran disalurkan,” tetapi juga “apakah kualitas hidup masyarakat benar-benar membaik?” Tanpa pertanyaan semacam ini, prioritas sosial mudah berubah menjadi ekspansi fiskal yang impresif di atas kertas, tetapi tipis dampaknya di lapangan.

5.4 Disiplin fiskal sebagai syarat keberlanjutan

Salah satu kesalahan umum dalam perdebatan publik adalah mempertentangkan keberpihakan sosial dengan disiplin fiskal seolah-olah keduanya saling meniadakan. Padahal, tanpa disiplin fiskal, kebijakan sosial justru dapat kehilangan fondasi pembiayaannya.

Realisasi Januari 2026 menunjukkan bahwa pendapatan negara tumbuh, tetapi belanja tumbuh lebih cepat: pendapatan Rp172,7 triliun, belanja Rp227,3 triliun, dan defisit Rp54,6 triliun. Reuters mencatat bahwa para ekonom menilai pertumbuhan penerimaan negara harus terus terjaga agar ekspansi fiskal Indonesia tetap kredibel, terlebih ketika defisit tahunan diperkirakan mendekati batas legal 3 persen PDB. Reuters juga melaporkan bahwa Fitch sedang meninjau posisi fiskal Indonesia setelah Moody's lebih dulu merevisi outlook menjadi negatif. ([Reuters](#))

Data ini penting karena menunjukkan bahwa disiplin fiskal bukan semata-mata ide abstrak. Ia berkaitan dengan biaya pembiayaan negara, kepercayaan pasar, dan kapasitas pemerintah untuk mempertahankan agenda prioritas tanpa harus melakukan koreksi mendadak. Negara yang terlalu jauh memperbesar komitmen belanja tanpa penguatan penerimaan akan berhadapan dengan ruang fiskal yang makin sempit.

Dengan demikian, disiplin fiskal justru harus dibaca sebagai perlindungan terhadap program sosial itu sendiri. Ia memastikan bahwa komitmen yang dibangun hari ini tidak runtuh besok karena pembiayaan yang rapuh.

5.5 Sisi penerimaan: unsur yang sering kalah populer

Politik anggaran hampir selalu lebih fokus pada belanja daripada penerimaan. Program yang memberi manfaat langsung lebih mudah membangun dukungan politik daripada reformasi perpajakan atau penertiban basis penerimaan negara. Padahal, keberlanjutan fiskal sangat ditentukan oleh kemampuan negara menghimpun sumber daya.

Dalam APBN 2026, target pendapatan negara dipatok pada Rp3.153,6 triliun setelah pembahasan dengan DPR. Artinya, perluasan belanja sosial dan agenda prioritas lainnya sangat bergantung pada kinerja penerimaan negara. Tanpa perbaikan basis pajak dan pendapatan lain yang konsisten, ruang fiskal akan makin sempit dan negara akan semakin bergantung pada pembiayaan. (kemenkeu.go.id)

Di titik ini, politik anggaran yang matang harus menghubungkan keberpihakan sosial dengan reformasi penerimaan. Negara yang ingin banyak memberi harus juga mampu menghimpun pendapatan secara adil, efisien, dan kredibel. Bila tidak, ekspansi sosial berisiko menjadi rapuh dan bergantung pada optimisme fiskal yang berlebihan.

6. Penutup

Tulisan ini menegaskan bahwa politik anggaran di Indonesia adalah arena pertemuan antara **legitimasi politik**, **prioritas sosial**, dan **disiplin fiskal**. APBN tidak pernah netral karena selalu mencerminkan pilihan tentang siapa yang diprioritaskan dan risiko apa yang bersedia diambil negara.

Kasus APBN 2026 menunjukkan dinamika itu secara jelas. RAPBN 2026 dirancang ekspansif, lalu mengalami penyesuaian dalam proses politik dengan DPR, dan pada awal implementasinya sudah memperlihatkan tekanan belanja yang cukup besar. Program makan bergizi gratis menjadi contoh penting karena ia sekaligus mencerminkan keberpihakan sosial yang nyata, daya tarik politik yang kuat, dan tuntutan besar terhadap tata kelola serta pembiayaan. (media.kemenkeu.go.id)

Dari pembahasan ini, dapat ditarik tiga simpulan. Pertama, tidak semua kebijakan sosial yang populer bersifat populistik; banyak yang justru merupakan respons terhadap kebutuhan masyarakat. Kedua, kebijakan sosial harus dibedakan antara yang strategis dan yang sekadar simbolik, dan pembeda utamanya adalah kualitas desain, ketepatan sasaran, dan ukuran hasil. Ketiga, disiplin fiskal bukan lawan keberpihakan sosial, melainkan syarat agar keberpihakan itu dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Karena itu, politik anggaran Indonesia ke depan memerlukan sintesis yang lebih matang: negara harus tetap hadir bagi masyarakat, tetapi kehadiran itu harus dibangun di atas evaluasi yang ketat, transparansi fiskal, ketepatan sasaran, dan penguatan sisi penerimaan. Hanya dengan cara itulah anggaran dapat menjadi instrumen kesejahteraan, bukan sekadar instrumen popularitas.

Daftar Pustaka

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2026*. (media.kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *Ini Postur RAPBN 2026*. (kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN 2026: Sehat, kredibel, dan berpihak pada rakyat*. ([Media Keuangan](https://MediaKeuangan.com))

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). *APBN 2026 motor menuju pertumbuhan berkelanjutan*. (kemenkeu.go.id)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). *Publikasi APBN Kita Februari 2026*. (media.kemenkeu.go.id)

Reuters. (2025, 18 September). *Indonesian parliament committee approves 2026 budget; deficit seen higher at 2.68% of GDP*. ([Reuters](https://Reuters.com))

Rudy C Tarumingkeng: Politik Anggaran di Indonesia: Antara Populisme, Prioritas Sosial, dan Disiplin Fiskal

Reuters. (2025, 23 September). *Indonesia parliament passes Prabowo's \$231 billion budget for 2026.* ([Reuters](#))

Reuters. (2026, 23 Februari). *Indonesia's government spending jumps 26% in January.* ([Reuters](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 27 Februari 2026. Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69a0e049-f348-839e-a931-88c684baeaaa>